

SEPUTAR RAKYAT

EDISI 06/TAHUN 1/AGUSTUS 2003

TAMAN NASIONAL LORE LINDU : PERLU PARADIGMA BARU

Ketika Amanat Rakyat DINIHIKANKAN...

Haruskah serah pasrah
Ketika kelaliman mendera kita
Haruskah membisu
Ketika durjana penguasa menginjak muka dan hati kita
haruskah diam
Ketika esok hari penguasa merampas apa yang kita punya
Pasrah, membisu, diam
Hanya akan menambah deretan penderitaan
Bangkit dan Bangkit!!!

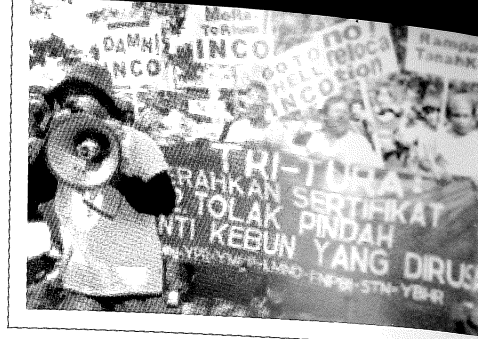




**BERGABUNGLAH
DALAM!
AKSI
INTERNASIONAL
MENENTANG**

**INCO
DI SELURUH DUNIA**

**tanggal
7 OKTOBER
2003**



**SIKAP
REDAKSI**

Sidang Pembaca yang budiman...

TAMAN Nasional Lore Lindu (TNLL) memang tak pernah sepi dari konflik. Ketegangan antara masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Lore Lindu dengan pengelola kawasan konservasi itu sudah berlangsung sejak penetapan kawasan itu pada tahun 1993.

Jauh sebelumnya, ketika masih berstatus calon taman nasional, konflik juga sudah berlangsung keras. Pemicu utamanya adalah hilangnya kesempatan masyarakat memasuki kawasan itu untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Sejak pertengahan 1970-an, keleluasaan itu berubah menjadi larangan. Korban pun berjatuhan. Dan masyarakat yang berdiam di dalam dan sekitar kawasan itu yang selalu menjadi korban.

Biangnya adalah paradigma pengelolaan TNLL yang sedikit sekali memberikan perhatian pada masyarakat di sekitar TNLL. Orang Katu dan Dodolo direkomendasikan untuk dipindahkan karena dianggap mengancam kehidupan pertumbuhan satwa dan tanaman di TNLL.

Berbagai kelembagaan dan pengetahuan mereka yang telah teruji selama ratusan tahun mampu menjaga kawasan tersebut ditiadakan pengelolaTNLL.

Apa yang terjadi? Model pengelolaan versi TNLL telah melahirkan sejumlah bom waktu yang setiap saat siap meledak. Terbukti, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, 4000 ha TNLL telah disulap menjadi lahan pertanian & pemukiman.

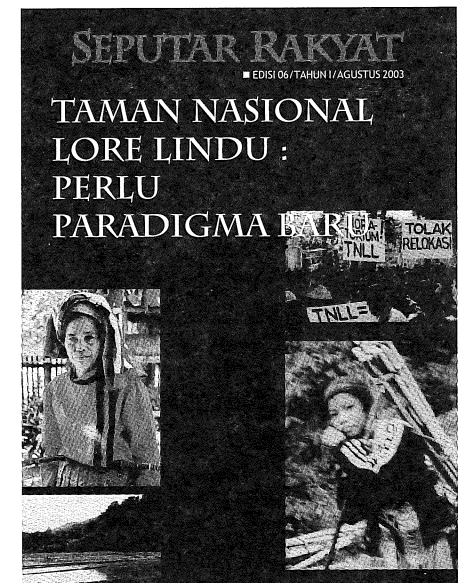
Bagaimana pun kebijakan dan praktek pengelolaan TNLL yang lebih banyak membuahkan pertentangan patut dipertanyakan kembali. Adalah sangat penting untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam pengelolaan taman nasional, dibandingkan dengan menaruh curiga terhadap mereka.

Dengan kata lain, penting sekali mempromosikan cara pandang baru tentang pengelolaan taman nasional, yang tidak menjadikan masyarakat di sekitarnya sebagai musuh. *Akhirnya, selamat membaca!*

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

	HLMN
DIALOG Menakar Keinginan Warga Dongi-Dongi	14-17
DUDUK PERKARA Ketika Korban Menjadi Perambah	07-09
KAJIAN Konservasi Yang Anti Rakyat	04-06
OPINI Perubahan Agraris di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu Oleh : Tania Li & Arianto Sangaji	18-27
SOLUSI Konflik di TNLL: Konservasi Berbasis Masyarakat Sebagai Jawaban	12-13
TEROPONG Banjir Duit Di Lore Lindu : Rakyat Gigit jari	09-10



SEPUTAR RAKYAT
EDISI 06/TAHUN I/AGUSTUS 2003

Diterbitkan oleh: Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penangguna Jawab:** Arianto Sangaji **Redaktur Pelaksana :** Yusriwati [On-Line] Andi Mizwar [Cetak] **Sidang Redaksi :** Arianto Sangaji, Lahmudin Yoto, Y.L. Franky, Sugiharto, Hamdin , Andi Mizwar, Silas Lahigi [Kulawi], Ferdinan Lumeno **Besoa**, Halim [Bungku], Agi Ruwata [Gimpu-Moa] **Sekretaris Redaksi:** Yusriwati **Tata Letak:** Andi Mizwar **Sirkulasi :** Nofrianto **Alamat Redaksi:** Jl. Tg. Manimbaya No. 114 Palu Sulawesi Tengah Indonesia **Telp/Fax.** 62-0451-425892 **E-mail:** hinoe@palu.wasantara.net.id **Website:** http://www.ytm.or.id

Perubahan Agraria Di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu

Oleh :

Tania Li (Universitas Dalhousie, Kanada) dan
Arianto Sangaji (Yayasan Tanah Merdeka, Palu-Indonesia)

Pendahuluan

KAWASAN sekitar Taman Nasional Lore Lindu telah menjadi subyek perubahan yang sangat cepat dalam dua dekade terakhir dan khususnya dalam lima tahun terakhir (1998 - 2003). Ada empat penyebab utama yang dapat diidentifikasi.

Pertama, sangat jelas, yakni peningkatan jalan dan pembukaan jalan baru yang menghubungkan antara Poso dan Palu via Napu pada tahun 1997 yang telah meningkatkan aksesibilitas. *Kedua*, telah terjadi peningkatan penduduk yang hampir mencapai 60% antara tahun 1980 dan 1990 (Yayasan Kayu Riva 1991).

Hal tersebut sebagai akibat program pemukiman kembali oleh pemerintah; transmigrasi dari Jawa dan Bali ke Lembah Napu, dan memaksa penduduk asli di dataran tinggi pindah dari bukit sekitar Kulawi ke Palolo berdasarkan program untuk masyarakat terisolir (juga disebut masyarakat terasing).

Pertambahan penduduk juga diakibatkan oleh masuknya para migran spontan dalam skala besar yang berasal dari Sulawesi Selatan, terutama Bugis yang sekarang jumlahnya berkisar 15% dari seluruh jumlah penduduk yang berdiam di sekitar batas Taman Nasional (Yayasan Kayu Riva 2001) dan mereka merupakan mayoritas di desa-desa di sekitar TNLL.

Penyebab utama yang *ketiga* terhadap perubahan agrarian adalah telah diperkenalkannya kakao sebagai tanaman keras, yang mempunyai harga tinggi sejak krisis moneter tahun 1997. Tujuan suku Bugis dan para migran lainnya yang pindah ke kawasan batas taman nasional adalah memperoleh lahan untuk perkebunan kakao.

Mengikuti contoh apa yang dilakukan sesama penduduk asli adalah merubah fungsi perladangan mereka sebelumnya, dari sawah tadah hujan

yang tidak produktif, mengganti tanaman cengkeh menjadi kakao.

Faktor *keempat* dalam perubahan agrarian adalah ditutupnya batas hutan, sampai sekarang "katup penyelamat" yang telah menyerap bertambahnya penduduk dan diizinkan-kannya kawasan tersebut untuk perluasan tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan. TNLL merupakan gambaran hutan yang sangat signifikan dengan luas; 218.000 hektar dimana secara prinsip semua bentuk pertanian dilarang.

Kempat faktor bersamaan (jalan, migrasi, kakao, penutupan batas hutan) telah menghasilkan dua efek yang signifikan. *Pertama*, meningkatnya jumlah penduduk tanpa tanah yang tinggal di sekitar batas taman nasional, dan berkembangnya suatu sistem kelas yang didasarkan pada ketidakadilan akses terhadap tanah sebagai sumber daya utama untuk produksi.

Kedua, adanya kritik mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang menyumbang terhadap krisis lahan. Sasaran kritik antara lain adalah rencana pemukiman kembali, yang tidak merencanakan kebutuhan lahan untuk generasi yang akan datang dan kebijakan konservasi yang lebih mementingkan keanekaragaman hayati di atas kebutuhan hidup masyarakat tani.

Akibat proses perubahan agraria telah meningkatkan tekanan pada batas-batas taman khususnya ketika lahan dapat diperoleh dan dijadikan lahan pertanian.

Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang masalah sosial sosial, ekonomi dan politik berkaitan dengan perubahan agraria, terutama dalam perspektif masyarakat setempat. Tulisan didasarkan pada observasi lapangan, diskusi informal dan wawancara di Palu, Palolo dan Napu pada tanggal 25

Mei sampai 22 Juni 2003.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian bersama yang dimulai pada tahun 2000, beberapa di antaranya telah dipublikasikan (eg Li 2002, Sangaji 2001a). Penelitian ini ditujukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, LSM, Donor dan yang mempunyai kepedulian terhadap konservasi dan pengembangan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Desa-desa penelitian adalah Watumaeta dan Sedoa di Napu, Rahmat di Palolo dan Dongi-Dongi, yakni pemukiman baru bukan program pemerintah yang dibuka oleh rakyat tahun 2001 dan secara luas dibahas dan diperdebatkan oleh pemerintah dan LSM (Li 2003). Dongi-Dongi terletak disepanjang jalan melintasi TNLL antara Palolo dan Napu.

●●●

Migrasi Bugis, Ledakan Kakao, Penjualan Lahan dan Tekanan Sosial

SEJAK awal krisis ekonomi tahun 1997, harga kakao yang relatif tinggi telah mendorong terjadinya migrasi orang Bugis ke Sulawesi Tengah yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Kawasan lahan dalam jumlah penting telah terjual kepada migran bugis melalui aparat pemerintahan (kepala desa dan staf lainnya dan pegawai-pegawai pemerintahan lain yang telah memperoleh lahan "tanah Negara" melalui cara yang legal atau tidak legal).

Di Watumaeta misalnya, populasi Bugis mencapai 58%, kebanyakan mereka tiba setelah tahun 1998 (Burkard 2002a, Burkard 2002b, Yayasan Kayu Riva 2001).

Sekarang ini Sedoa memiliki 41 Keluarga Bugis dari total populasi desa 168 keluarga (24%)(Yayasan Kayu Riva 2001). Gambaran populasi berdasarkan kelompok etnis tidak diperoleh di Desa Rahmat, namun data yang diperoleh

dari hasil survey kami tahun 2000 memperlihatkan bahwa di Dusun 3, 37 dari 81 keluarga adalah Bugis. Dusun 5 (Nopu), yang didominasi oleh Bugis telah mengalami peningkatan dalam jumlah yang besar selama lima tahun terakhir yang sekarang telah direncanakan untuk menjadi desa tersendiri (populasi 300 keluarga).

Penjualan lahan oleh para pegawai desa merupakan faktor utama pindahnya migran Bugis ke Watumaeta dan Sedoa. Legitimasi dari penjualan ini menjadi persoalan bagi penduduk. Di Rahmat, lahan-lahan utama yang dijual ke migran Bugis merupakan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh pejabat pemerintah, bagian dari jatah tanah yang harus dialokasikan kepada warga proyek pemukiman kembali.

Daftar tersebut mencakup, bekas Gubernur, staf kecamatan dan inspektorat wilayah (IRDA, Inspektorat Daerah) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penduduk lokal juga menjual tanah ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Namun dalam skala yang lebih kecil (contohnya, 1/2 ha, 1 ha).

Saat ini, kebanyakan mereka menyesali penjualan tanahnya, namun tekanan ekonomi adalah signifikan. Seorang petani kakao Bugis di Rahmat mengatakan bahwa ia baru saja membeli 2 ha dengan harga Rp. 50 juta. "Biar mahal" katanya "asal dapat beli".

Implikasi dari penetapan para petani kakao Bugis sekarang dan di masa yang akan datang menjadikan harga tanah akan sangat tinggi, menjadikannya semakin sulit bagi penduduk lokal yang relatif miskin untuk mempertahankan lahan mereka yang masih tersisa dan mustahil bagi mereka untuk membeli lahan di desa mereka sendiri untuk menopang dasar perekonomian mereka untuk generasi yang akan datang. Kehadiran migran bugis dan daya tarik kakao telah menciptakan dua dampak.

Pertama, migrasi bugis dan pembelian lahan telah memperkuat krisis ketersediaan lahan bagi penduduk lokal.

Kedua, hal tersebut telah memperkuat keinginan penduduk lokal mengikuti orang bugis sebagai contoh dan menanam kakao sebagai jalan

menuju kesejahteraan. Penduduk lokal yang dulu memprioritaskan tanaman pangan (padi, jagung, umbi-umbian, sayur-sayuran) dan kopi, komoditi yang lama sudah dijual belikan, saat ini tengah berada dalam proses pergantian strategi produksi mereka ke perkebunan kakao.

Bagaimana mereka yang tidak memiliki lahan? Lahan merupakan sesuatu yang sangat mencemaskan sebab tanpa lahan, di mana mereka harus menanam kakao? Mereka menggambarkan pengalaman mereka sebagai buruh tani pada orang lain dengan istilah yang keras seperti "menjadi budak orang Bugis" atau "kasih bersih kebun mereka sedang kami tidak punya" Perasaan jengkel, marah, cemburu sudah ada dan kelihatannya akan meningkat.

Kemungkinan konflik horizontal sangat nyata di sini, di mana kelas, kesukuan, dan agama berseberangan ke dalam suatu kesatuan "kami lawan mereka", yang sering diekspresikan baik secara langsung maupun tidak. Bugis digambarkan oleh penduduk lokal sebagai "orang kaya", penduduk lokal digambarkan oleh orang Bugis sebagai "orang yang hanya menjual tanahnya dan bekerja sebagai buruh penerima upah atau pengumpul rotan" Dalam kedua kasus, ini merupakan pernyataan berlebihan yang sederhana dan stereotype namun mereka mempunyai dasar empiris.

●●●

2. Inisiatif untuk memperoleh Lahan

PADA setiap lokasi studi kasus kami, dan banyak tempat lain di sekeliling Taman Nasional Lore Lindu, orang desa telah mengambil tindakan sendiri-sendiri atau secara berkelompok agar dapat memperoleh lahan untuk pertanian terutama kakao. Dalam banyak kasus, lahan berada dalam batas kawasan TNLL, di mana batas tersebut ditetapkan secara sepihak sejak tahun 1993 dan tidak pernah dianggap sah oleh penduduk yang bermukim di sekitar batas taman.

Contoh yang sangat dramatis dari aksi kolektif untuk memperoleh lahan dari taman adalah Dongi-Dongi. Banyak peninjau memberikan pendapat bahwa kasus Dongi-Dongi akan memprovokasi penduduk desa

lain untuk menuntut lahan taman nasional. Namun demikian bukti dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa Dongi-Dongi perlu dilihat dalam konteks tututan lahan yang terjadi serupa pada tiga desa penelitian lainnya dan kebanyakan desa-desa lain yang berada di sekitar Taman Nasional Lore Lindu.

Namun demikian, aksi-aksi tersebut bukan mengikuti kasus Dongi-Dongi, tetapi mereka telah lebih dulu melakukan. Hal ini menunjukkan suatu masalah mendasar dalam hubungan TNLL dengan masyarakat, yang membutuhkan suatu pendekatan pemecahan masalah secara menyeluruh.

Di Watumaeta, penduduk desa telah membuka areal lahan di dalam batas TNLL yang mereka anggap sebagai tanah leluhur (tanah adat) mereka. "Kami tidak mengambil lahan dari Taman Nasional", mereka bantah "Taman Nasional mengambil lahan dari kami". Areal yang mereka tuntutan adalah lahan di pinggiran desa yang relatif datar.

Mereka mengatakan lahan ini sangat sesuai untuk pertanian, yang memberikan pengaruh kecil atau tidak ada kerusakan lingkungan. Mereka mengusulkan suatu batas baru untuk TNLL di mana lahan yang curam, menurut pendapat mereka, di situlah seharusnya batas taman nasional. Mereka mengupayakan melembagakan suatu sistem pembagian lahan yang adil (2 ha per keluarga), dan mengusulkan untuk menghindari lahan yang curam dan pinggiran sungai.

Mereka juga mengusulkan pembatasan penjualan lahan. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang siapa yang akan diberi hak untuk memiliki lahan; beberapa orang mengatakan hanya penduduk asli Napu sedangkan yang lainnya mengatakan semua penduduk desa termasuk pendatang baru (Bugis dan pengungsi Poso)

Di Sedoa, penduduk desa telah lama difasilitasi dalam proses perencanaan oleh The Nature Conservancy Palu dan secara resmi telah menandatangani kesepakatan konservasi masyarakat (KKM). Lampiran dari kesepakatan ini masih sedang menunggu tanda tangan pejabat yakni usulan untuk

memperoleh kembali tanah leluhur (tanah adat mereka di dalam batas taman nasional). Dasar tuntutan mereka sama dengan di Watumaeta. Menurut mereka sangat keliru memasukkan tanah leluhur ke dalam taman nasional.

Mereka menginginkan tanah tersebut dikembalikan kepada mereka. Mereka yakin bahwa mereka sudah sangat sabar bekerja di dalam aturan-aturan pemerintah dan mengikuti suatu proses konsultasi yang cukup panjang dan mendalam.

Mereka yakin bahwa mereka telah menunjukkan komitmennya terhadap konservasi dengan melakukan tugas pengawasan taman dengan sukarela untuk membantu jagawana yang digaji, suatu tugas yang membebani mereka dengan waktu dan uang.

Namun demikian, seandainya tuntutan mereka untuk memiliki kembali tanah leluhur (tanah adat) mereka ditolak atau izin pemanfaatan lahan yang disetujui Balai taman nasional terlalu membatasi penggunaannya (misalnya tidak boleh menanam kakao), akibatnya masyarakat akan frustrasi.

Ada kemungkinan mereka akan melakukan aksi unilateral untuk memperoleh kembali lahan mereka (sebagaimana di Watumaeta dan desa-desa lain yang berbatasan dengan taman)

Di Rahmat, penduduk desa adalah warga program pemukiman kembali masyarakat terasing (PKMT) 1975-7. Pada awalnya telah disampaikan oleh pejabat pemerintah bahwa mereka boleh berladang dan menanam kopi di dalam hutan yang berbatasan dengan pemukiman.

Akses kepada lahan tambahan itu diisinkan oleh karena tidak semua keluarga dapat jatah lahan sawah; lain kehilangan sawah akibat banjir; yang lainnya hilang diambil oleh pejabat pemerintah; dan ada ditemukan sawah namun tidak menarik, karena butuh tenaga buruh dan tidak biasa mengolah sawah dan merasa terlalu berat mereka menjual lokasi sawah dan berkonsentrasi terhadap upaya ekonomi mereka di lahan tambahan di sekitar hutan.

Setelah panen hasil ladang, petani Rahmat menanam kopi, buah-buahan, rotan dan tanaman lain yang berharga.

Di lokasi curam, mereka tidak membabat hutan tetapi menanam kopi di bawah pohon. Berbeda dengan di Sedoa dan Watumaeta, mereka tidak memandang tanah tambahan sebagai tanah leluhur, namun mereka sangat yakin bahwa mereka akan diizinkan mengelola tanah tersebut oleh camat dan petugas kehutanan (Yani Boya), yang mengawasi mereka pindah ke Rahmat.

Petugas kehutanan ini menjelaskan pada mereka, yang mana tanah untuk mereka dan yang mana merupakan milik Departemen Kehutanan. Batas yang disetujui adalah sekitar 3 km dari pemukiman Rahmat dan sampai sekarang batas tersebut masih diakui dan dihormati para petani Rahmat.

Masalah baru timbul di Rahmat setelah lahan tambahan petani dicaplok oleh TNLL pada tahun 1982, segera setelah usulan TNLL dideklarasikan pada Kongres Taman Nasional Dunia di Bali. Batas baru tersebut persis berada di sudut pemukiman Rahmat, mengikuti jalan Logging PT. Kebun Sari yang populer dengan sebutan "Jalan Jepang". Setelah tahun 1982 mereka selanjutnya memelihara lahan dan tanaman mereka, walaupun melewati batas taman yang baru, dan gubuk mereka sering dihancurkan dan dibakar oleh petugas jagawana.

Sejak tahun 1998, penduduk desa mulai lebih berani melakukan aktivitas pertanian di dalam taman, memperluas lahan perkebunan dan mengganti tanaman kopi menjadi kakao, sebagaimana hasil monitoring studi yang dilakukan oleh The Nature Conservancy (TNC 2002).

Beda dengan kopi, kakao memerlukan lebih banyak sinar matahari sehingga pohon-pohon besar perlu dibabat, tetapi jagawana tetap melarang. Pada tahun 2001, setelah beberapa konfrontasi panas yang beruntun, para jagawana meninggalkan Rahmat dan desa-desa tetangga (Kamarora, Sintuwu, Tongoa).

Ketidakterbatasan Jagawana memberikan kesempatan bagi mereka untuk menghilangkan lebih banyak canopy hutan agar tanaman kakao yang masih tersembunyi bisa berhasil, dan menciptakan perubahan yang dramatis terhadap landscape. Tetapi

yang penting diingat, kakao itu jelas sudah ada di dalam taman sebelum 2001, dan sebelum pendudukan Dongi-Dongi.

Dengan beberapa pengecualian (3 kasus tercatat), di mana masyarakat menuntut kembali tanah mereka dari TNLL di Rahmat tidak ke Dongi-Dongi, karena kebutuhan akan lahan sudah terpenuhi. Seperti di Watumaeta, di Rahmat ada rencana di sudut hutan untuk melembagakan suatu sistem pembagian lahan 2 (dua) ha perkeluarga, pembatasan penjualan tanah dan aturan-aturan lingkungan berkaitan dengan perlindungan terhadap kemiringan tanah dan sungai.

Ada perasaan yang kuat bahwa tanah di disini hanya diperuntukkan kepada "penduduk lokal" atau penduduk asli, dan tidak termasuk Bugis yang sudah menguasai sebagian besar lahan pertanian di desa Rahmat.

Lahan pertanian yang diambil rakyat di Dongi-Dongi tergolong skala besar dibanding dengan contoh lainnya (sekitar 4000 ha), namun inisiatif ini mempunyai beberapa kesamaan dengan inisiatif lain penuntutan kembali seperti terjadi di desa-desa tetangga.

Pemukiman Dongi-Dongi didasarkan pada pandangan dari krisis lahan; pada benturan terhadap keabsahan batas TNLL; dan pada bantahan bahwa tanah yang layak menjadi lahan pertanian harus dapat disediakan bagi mereka yang tidak memiliki lahan; diberlakukan suatu perangkat aturan yang sama tentang siapa yang tidak memiliki lahan; tidak termasuk orang Bugis (yang diasosiasikan telah memiliki lahan); dialokasikan 2 ha perkeluarga; dilarang menjual tanah dan dilarang pembabatan di lokasi curam maupun di aliran sungai.

Sebagaimana kasus di atas, aturan-aturan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Namun adanya aturan demikian menggambarkan bahwa di Dongi-Dongi dan di desa-desa lain sekitar taman nasional terdapat persamaan visi tentang siapa yang berhak memiliki tanah dan bagaimana mengelolanya.

Adalah penting untuk membedakan Dongi-Dongi dengan Tongoa, desa pertama yang dilihat pengujung ketika berjalan sepanjang jalan dari

palu. Di Tongoa, menurut pengetahuan kami, pembersihan lahan dalam skala besar nampak pada saat yang sama seperti Dongi-Dongi, tetapi dengan tanpa organisasi sebelumnya atau aturan alokasi, kemiringan dan lain-lain. Tanah dengan kemiringan yang curam telah dibabat dan sangat merusak lingkungan.

Kesan negatif ini tercipta pada saat pengunjung berada di Dongi-Dongi, di mana telah banyak perhatian yang dilakukan untuk menciptakan dan memberlakukan aturan namun masih ada hambatan yang signifikan.

●●●

3. Beberapa jalan menuju Dongi-Dongi

JUMLAH rumah tangga yang berdiam di Dongi-Dongi diperkirakan antara 500 sampai 1500. Jumlah dicatat oleh Balai TNLL setelah pendudukan 1030. Komposisi penduduk sangat bervariasi. Mayoritas penduduk (85% dari beberapa perkiraan) merupakan etnis Da'a yang berasal dari pegunungan Kamalisi di sebelah barat Palu. Juga orang Raranganao dan Uma dari Kulawi.

Ada juga suku Kaili Ledo yang ikut bergabung dengan program pemerintah PKMT di Palolo, dan ada sekitar 30 keluarga pengungsi Poso, Bugis dan Toraja yang telah memperoleh akses ke Dongi-Dongi melalui berbagai mekanisme yang melanggar aturan organisasi petani, Forum Petani Merdeka (FPM).

Dari hasil wawancara dengan penduduk, dapat memperoleh gambaran tentang latar belakang masyarakat Da'a yang menuju ke Dongi-Dongi. Ada beberapa kelompok keluarga, dan masing-masing kelompok mempunyai jalur perjalanan yang unik, sebuah ceritera yang menjelaskan bagaimana mereka datang ke Dongi-Dongi dan mengapa mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Di bawah ini beberapa gambaran :

- a) Da'a yang dimukimkan kembali di Palolo (Rahmat, Palolo dan Kadidia) dalam pertengahan tahun 1970'an melalui program pemerintah pemukiman kembali untuk masyarakat terasing yang pindah ke Dongi-Dongi, karena :
- mereka tidak memperoleh pembagian 2 ha tanah yang

diperuntukkan kepada mereka

- tanah mereka sudah dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat pemerintah

- mereka telah menjual tanah mereka untuk mengatasi krisis keluarga mereka seperti sakit, kematian dan untuk memenuhi kebutuhan perkawinan

- tanah mereka telah tersapu oleh beberapa bencana banjir yang menyebabkan ratusan hektar pemukiman desa-desa (Rahmat, Kadidia, Kamarora A, Kamarora B)

- mereka adalah generasi kedua yang menerima pembagian 2 ha perkeluarga namun tidak mencukupi

- pengalaman panjang sebagai buruh harian yang menyebabkan mereka tidak akan pernah merasa sejahtera tanpa memiliki tanah sendiri.

b) Da'a yang pindah ke Palolo atau ke Sidondo (suatu lokasi pemukiman dekat Palu) atas inisiatif mereka sendiri pada periode 1970-1990. Mereka tidak memperoleh jatah tanah dari pemerintah, tetapi mereka mencari petak-petak kecil berbatasan dengan lokasi pemukiman pemerintah atau bekerja sebagai buruh.

Tujuan awal mereka bermigrasi keluar dari wilayah asal adalah :

- untuk memutus isolasi dari kehidupan di pegunungan Kamalise, di saat desa-desa mereka masih dapat dicapai dengan berjalan kaki yang membutuhkan waktu 1 - 5 hari

- untuk memperoleh akses ke pasar terhadap produk mereka (kopi, sayur-sayuran, jagung) yang mereka lebih dulu harus membawanya ke pasar, dan menjual dengan harga yang sangat murah

- untuk mengumpulkan kembali keluarga yang telah terpecah oleh program pemukiman kembali pemerintah

- untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang tidak tersedia di desa mereka.

Sangat sulit bagi migran spontan ini untuk memperoleh tanah sejak mereka meninggalkan tanah leluhur mereka, dan di Dongi-Dongi

merupakan kesempatan pertama mereka untuk memiliki sebidang tanah.

Perlu dicatat bahwa kehadiran migran sukarela ini mengindikasikan keberhasilan dari program pemukiman kembali pemerintah, sementara banyak lokasi pemukiman kembali pemerintah (transmigrasi dan PKMT), masih luas dibanding dengan target mereka terhadap penduduk. Di Palolo pemukiman tersebut masih terus menjadi daya tarik terhadap migran-migran dari bukit, walaupun lokasi itu bermasalah (berkurangnya tanah pertanian, teknis pengurangan migrasi, banjir dan lain-lain).

Banyak orang Da'a ingin menjadi bagian dari masyarakat luas, dan untuk mencapai tujuan itu mereka perlu akses kepada fasilitas jalan, pasar dan pendidikan. Untuk memperoleh akses tersebut mereka siap meninggalkan tanah leluhur mereka.

Sebaliknya orang Da'a lainnya tetap tinggal pada tempat asli mereka, menjaga tanah pemakaman leluhur, tanah dan pekarangan serta menunggu kehadiran pembangunan bagi desa mereka (jalan, sekolah, fasilitas lain-lain).

c) Da'a yang melakukan perjalanan langsung dari bukit leluhur mereka ke Dongi-Dongi. Untuk kelompok ini, sama halnya dengan kelompok b, namun mereka menunggu di desa kediaman mereka selama lebih dua puluh tahun sebelum mengambil inisiatif untuk mendapatkan tempat yang tersedia jalan, dan juga mereka dapat memutus keterisolasiannya mereka dan "bisa lihat mobil" melintas di depan gubuk mereka setiap hari. Mereka bercanda tentang kegugupan mereka kadang berada di kesibukan jalan di Palu dan mereka malu disebut "Tolare" (suatu istilah penghinaan untuk orang gunung yang digunakan oleh orang kota). Kategori kelompok ini termasuk :

- sepuluh keluarga yang berjalan kaki seminggu dari bukit Kamalise untuk mencapai Dongi-Dongi. Mereka membawa anak-anak dan memikul harta milik lainnya, sebab mereka tidak memiliki uang untuk

membayar sewa mobil dari Palu ke Dongi-Dongi

- lima keluarga yang berjalan ke palu (tiga hari) membawa anak-anak dan milik mereka dan kopi yang cukup untuk dijual guna membayar sewa mobil ke Dongi-Dongi

- rumah tangga lain yang merupakan bagian dari yang awal berangkat untuk bermukim di Dongi-Dongi (1999,2000), dibawah pimpinan sanak mereka dan Pak Lili yang merupakan seorang veteran Dongi-Dongi. Kelompok ini kembali ke Bukit Kamalise atau menjadi buruh di Palolo setiap kali mereka diusir dari lokasi oleh jagawana namun segera kembali.

Da'a yang datang langsung ke Dongi-Dongi dari tempat tinggal mereka di gunung belum kembali ke desa asal mereka bahkan untuk mengunjungi keluarganya. Mereka telah membangun gubuk yang kecil. Mereka memiliki sedikit sekali harta, mereka bertahan hidup terutama dengan mengumpulkan rotan sementara mereka membersihkan kebun mereka dan menunggu untuk dipanen.

Mereka juga telah mulai menanam kakao (bekerja paruh hari dengan pemukim lain untuk memperoleh upah dalam pembenihan kakao). Mereka mempunyai harapan yang tinggi bahwa mereka akan makmur di Dongi-Dongi dan anak-anak mereka akan dapat mengenyam pendidikan di sekolah.

●●●

4. Sosial, Ekonomi dan Dinamika Politik di Dongi-Dongi.

PENDUDUK di Dongi-Dongi beragam bukan hanya atas asal etnisnya dan jalur perjalanan migrasi tetapi juga dalam posisi kelas. Ada beberapa pemilik gergaji mesin (chain saw) yang memperoleh keuntungan signifikan dari akses pengelolaan kayu selama periode pembersihan kebun. Ada beberapa orang yang mencari upah kecil dengan membawa kayu dan rotan ke luar sisi jalan.

Ada beberapa orang datang ke Dongi-Dongi dengan modal dalam bentuk tabungan, beberapa orang menjual tanah untuk memperoleh

modal guna membiayai enam bulan pertama mereka di Dongi-Dongi. Yang lainnya datang tanpa apapun, mereka sangat lamban mengerjakan kebun karena mereka harus butuh beberapa hari untuk memperoleh upah buruh di Dongi-Dongi atau di Palolo, mereka bekerja untuk petani kakao Bugis.

Beberapa di antara mereka bertahan hidup dengan memakan tumbuhan liar hutan (buah-buahan Dongi-Dongi, merupakan asal nama lokasi itu, pucuk rotan, hati palem dan daging hewan buruan)

Dalam perbandingan dengan program pemukiman kembali pemerintah seperti PKMT yang berlokasi di Palolo, dimana petugas pemerintah telah menyaplok ratusan hektar lahan dari jatah rakyat, alokasi lahan di Dongi-Dongi telah menjadi relatif egaliter. Tidak ada pemilik lahan yang luas (lebih dari 4 ha), dan aturan melarang pegawai pemerintah untuk memiliki lahan telah diberlakukan. Namun beberapa penduduk memperoleh lahan seluas lebih dari 2 ha, karena cepat masuk dan merintis kebunnya.

Ada juga beberapa keluarga masih menunggu untuk menerima alokasi tanah mereka secara penuh, karena baru memperoleh lahan pekarangan. Yang lain, memperoleh lahan pertanian terletak jauh, sekitar 3 km dari pinggir jalan, sehingga telah membangun rumahnya di lokasi kebun untuk memudahkan akses dan penjagaan. Akibat sisa-sisa hutan di antara kebun yang sudah bersih, ada gangguan hama (tikus, ular, babi liar), terutama yang dekat dengan pinggir hutan.

Forum Petani Merdeka membentuk struktur kepemimpinan dan organisasi sosial di Dongi-Dongi, dikepalai oleh badan pengurus. Ada sistem pembagian ruang, yang terdiri dari empat blok utama yang diberi nama berdasarkan pemukiman asal di Palolo (blok Rahmat, blok Kamarora dan lain-lain).

Setiap blok mempunyai kepala dan wakil. Dalam diskusi perorangan dan beberapa pertemuan tingkat blok, yang kami hadiri selama kunjungan satu minggu di Dongi-Dongi, kami mendengar banyak penduduk menyatakan ketidakpuasan mereka dengan kegiatan forum tersebut. Terutama

mereka menyesal masalah peraturan yang kurang tegas, sehingga telah terjadi penjualan kayu, pembersihan terhadap daerah kemiringan dan curam dan lain sebagainya, yang secara prinsip dilarang oleh Forum.

Mereka sangat sadar bahwa kekeliruan seperti itu telah menghancurkan citra Forum dan pendudukan dongi-Dongi sebagai gerakan petani yang berorientasi lahan, dan memberikan prospek yang beresiko terhadap pengakuan.

Pada suatu pertemuan forum di akhir Juni, suatu kesepakatan telah dicapai untuk mengadakan kongres guna melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur dan memilih pemimpin Forum.

YBHR, LSM yang telah bekerja dengan sangat konsisten di Dongi-Dongi selama dua tahun terakhir, mengakui adanya kelemahan dalam forum dan telah bekerja untuk melakukan penguatan organisasi dan membangun kesadaran rakyat untuk perbaikan.

Tantangan untuk mengorganisasi Dongi-Dongi sangat signifikan; ada lebih dari ribuan rumah tangga yang berbeda asal menyebar 15 km kirikan jalan, menduduki sekitar 4000 hektar dalam areal. Belum ada dukungan dari departemen pemerintah (pendidikan, kesehatan, pertanian).

Dengan alasan masih belum jelas, pihak kehutanan membiarkan kayu keluar dari lokasi tersebut hampir selama tiga tahun sebelum dihentikan dengan operasi penjagaan yang efektif. Tidak efektif penjagaan memberi peluang mengintervensi sindikat ilegal logging, yang didukung oleh anggota kepolisian, tentara, departemen kehutanan dan yang lainnya.

Lambannya pengakuan terhadap pemukiman Dongi-Dongi telah menciptakan suatu situasi yang tidak pasti, di mana penegakan aturan-aturan di kalangan rakyat menjadi sangat sulit. Sumber utama ketegasan peraturan Forum adalah kharisma dari pimpinan Forum sendiri, dan kharisma itu pernah disalah gunakan.

Ancaman akan diusir yang sering diulangi oleh pemerintah telah membuat beberapa penduduk telah mencari keuntungan jangka pendek

dari kayu dan sumber daya lainnya, dan membatasi investasi tenaga mereka serta modal di lahan garapan.

Namun penduduk lain tidak acuh terhadap kedua ancaman dan terus mengolah lahan sesuai dengan tujuan awal mereka. Kelompok ini samasekali memutuskan untuk tinggal di Dongi-Dongi dan mereka siap mati bila dipaksakan dalam upaya memindahkan mereka.

●●●

5. Krisis Legitimasi di Zone Batas TNLL.

DI SETIAP empat lokasi penelitian (Watumaeta, Sedoa, Dongi-Dongi, Rahmat), wawancara dan diskusi dengan penduduk secara perorangan dan dalam kelompok menunjukkan suatu tanda-tanda kritik yang kuat dan konsisten terhadap kebijakan pemerintah, proyek dan praktek yang hanya merugikan mereka.

Penting dipahami bahwa kegagalan proyek dan kebijakan yang salah arah bukan hanya mengecewakan penduduk desa tetapi juga menciptakan sifat radikal, di mana mereka harus memecahkan masalah-masalah mereka sendiri.

Dengan beberapa pengecualian, kritik tersebut demikian tidak disampaikan dalam istilah yang abstrak, tetapi melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari di dalam pengalaman kongkrit di batas TNLL. Paragraf berikut meringkas beberapa elemen utama dari beberapa kritik ini sebagai cermin sikap penduduk desa yang tinggal berdekatan dengan taman.

- Penduduk desa yakin bahwa batas taman telah ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak, dan letaknya sering salah, karena memisahkan masyarakat dari tanah leluhurnya atau tanah yang mereka peroleh dari petugas kehutanan dalam program pemukiman kembali.

Karena itu batas-batas tersebut tidak sah. Mereka menceritakan bagaimana tanda-tanda batas dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlalu tua, terlalau malas atau terlalu tidak peduli untuk naik ke atas daerah perkebunan, jadi mereka langsung menempatkan tanda batas di sisi jalan, beberapa di antaranya 1 - 3 km dari lokasi

mereka yang sah.

- Beberapa orang desa menyadari bahwa tidak ada program pengesahan zonasi untuk taman sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang konservasi. Petani di Dongi-Dongi berhati-hati terhadap isu ini ketika mereka diberitahukan bahwa Dongi-Dongi dikalsifikasikan sebagai zona inti, dan kemudian hal ini memperlihatkan bahwa klasifikasi tersebut masih merupakan suatu "draft".

Mereka tahu benar bahwa tanah di Dongi-Dongi telah ditebangi hutannya pada tahun 1980-an dan 90-an ketika PT kebun Sari memegang lisensi logging (hak penguasaan hutan) selama 25 tahun. Mereka melakukan pengawasan dengan menunjuk lapangan helikopter yang berlokasi di Dongi-Dongi, menunjuk ban-ban truk bekas dan barang-barang rusak lainnya untuk menyatakan bahwa kawasan ini bukan hutan belantara.

- Hanya sedikit penduduk desa yang tinggal di perbatasan mengetahui bahwa draft program zonasi dan rencana pengelolaan 25 tahun yang disiapkan BTNLL dengan bantuan TNC telah mengupayakan untuk menerima masukan dari penduduk desa dengan memetakan dan menginventarisir semua pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang ada di dalam maupun di luar kawasan.

Walaupun mereka menyadari hal tersebut, namun mereka kemungkinan tidak puas karena draft rencana belum mengakui hak petani terhadap tanah pertanian, yang merupakan kunci utama pertentangan antara masyarakat dengan Taman saat ini.

- Penduduk desa di pinggir taman memiliki kesan bahwa pengelola taman dan agen-agen pendukung seperti TNC hanya memprioritaskan flora dan fauna di atas kehidupan penduduk lokal. Penduduk umumnya setuju bahwa konservasi dan keberadaan TNLL adalah sah. Mereka melihat pada lereng-lereng gunung pada inti taman dan berkata "itulah taman, tanah yang datar di sini adalah untuk kami."

Kebanyakan dari mereka mencari model keadilan dan co-existensi masyarakat dengan taman.

- Penduduk desa di pinggir taman memiliki pemahaman sendiri-sendiri mengenai resiko ekologis. Mereka yakin bahwa pengetahuan adat mereka terhadap masalah ini adalah lebih dari apa yang dimaksudkan oleh pejabat pemerintah dan masyarakat yang tinggal di kota. Mereka menunjuk lokasi-lokasi yang pernah dihantam banjir atau longsor tanah tanpa pembabatan hutan apapun: sebagian banjir merupakan fenomena alam.

- Peduduk Palolo menyatakan bahwa program pemukiman kembali pemerintah di Lemban Tongoa dibangun pada tanah yang sangat curam, dan menjadi penyebab banjir di daerah bagian dekat Palolo, dengan menyapu ratusan hektar sawah di desa pemukiman mereka (Kamarora, Rahmat).

Mereka yakin bahwa mereka telah menderita secara langsung dari kegagalan pemerintah dalam memahami ekologi lokal. Penduduk Dongi-Dongi menolak usulan untuk memindahkan mereka ke tempat pemukiman yang baru di Uenui dan Mangalapi karena tanah di sana sangat curam. Mereka melihat usulan ini sebagai bukti bahwa pemerintah benar-benar tidak peduli dengan banjir.

Resiko banjir akan sangat kecil jika mereka diberikan hak untuk tetap tinggal dengan damai di Dongi-Dongi, di mana tanah umumnya datar dan sangat layak untuk pertanian.

- Penduduk desa di pinggir taman menyatakan bahwa pengalaman mereka sebagai peladang berpindah di tanah yang curam dan berbatu sepanjang pegunungan Kamalise dan Kulawi telah memberikan mereka kemampuan untuk memastikan apakah kemiringan tanah, dapat atau tidak dapat diolah. Pada lahan curam mereka tidak menebang pohon besar, tetapi di bawahnya ditanami kopi.

Pada saat mereka membakar ladang mereka melakukan perlindungan terhadap rotan, pohon buah-buahan, pepohonan untuk

menarik burung-burung yang sering mereka buru, dan kayu yang bernilai untuk dapat dijual pada masa yang akan datang pada saat mereka memerlukan uang dan/atau untuk membangun rumah.

- Kemampuan masyarakat untuk mengolah lahan dengan tehnik wanatani seperti diuraikan di atas telah terbukti sepanjang jalan 3 km masuk ke TNLL di atas Rahmat, di mana kami melihat berbagai tanaman yang dibudidayakan atau dipelihara selama 20 tahun, walaupun sering ditebang atau dicabut jagawana.

Pada perjalanan 3 km di Dongi-Dongi, kami melihat bahwa lahan yang telah dibersihkan secara intensif ditanami dengan tumpang sari kakao, kopi, kemiri, alpokat, mangga dan durian. "Supaya menjadi hutan kembali", sebagaimana dikatakan para petani.

- Penduduk desa Palolo sangat marah dengan perilaku para jagawana, yang sangat jelas mempengaruhi kehidupan mereka setiap hari dan punya kekuasaan luar biasa sebagai ujung tombak taman nasional.

Mereka sangat marah ketika jagawana menebang kopi, kakao dan pohon buah-buahan mereka, mencabut tanaman tomat, lombok mereka, membakar gubuk-gubuk mereka, dan mencuri parang dan alat peralatan memasak mereka. Yang mereka paling benci adalah jagawana memperlakukan standar ganda.

- Seorang wanita yang sekarang tinggal di Dongi-Dongi menjelaskan bagaimana jagawana sebagai orang pertama yang masuk ke pondok kebunnya, sebagai tamu yang diajak minum kopi dan makan di pondoknya.

Mereka kemudian pamit dengan baik, tetapi langsung menghancurkan tanamannya dan kemudian membakar gubuknya. Perilaku ini merupakan perlakuan yang tidak manusiawi kepadanya.

Yang lainnya menggambarkan bagaimana jagawana sebagai orang pertama yang memanen lombok dan sayur-sayuran mereka, membawa kantong untuk menyimpan hasil

rampasan kemudian menghancurkan tanaman tersebut.

Mereka menggambarkan bagaimana jagawana secara rutin terlibat dalam pencurian rotan dan kayu dari taman, selanjutnya menebas dan menghancurkan rotan yang telah dikumpulkan orang desa.

- Perilaku jagawana di Palolo meyakinkan orang desa bahwa TNLL tidak memiliki aturan real. Tidak ada standar konservasi dan hanya menjadi kendaraan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengeksploitasi dan menindas mereka.

Hal ini mengakibatkan pendiskreditan dari otoritas taman. Penduduk merasa yakin bahwa mereka dapat melakukan perlindungan hutan secara lebih baik, sementara dalam waktu yang sama mereka juga bisa mencapai hidup yang layak.

- Beberapa penduduk desa di batas taman menyatakan bahwa taman adalah "kekayaan dunia". Mereka percaya bahwa badan-badan internasional yang digambarkan dalam berbagai ragam seperti Bank Dunia, IMF, The Nature Conservancy, Care, STORMA (proyek penelitian kerjasama antara German - Indonesia), Bank Pembangunan Asia, atau "sembilan Negara" telah membeli taman tersebut dari pemerintah Indonesia dan/atau sebagai jaminan terhadap dana pinjaman.

Mereka yakin badan-badan ini ingin mengeksploitasi taman terhadap sumber mineralnya, keanekaragaman hayatinya bernilai komersial, atau sebagai tempat wisata dan hiburan. Penduduk desa meyakini bahwa penderitaan hidup mereka sebagai akibat dari kepentingan kekuatan asing tersebut.

- Kesan dari intervensi asing ini telah dipacu oleh dua faktor, *Pertama*, kehadiran orang barat berbasis di Palu yang sering melakukan perjalanan ke taman dan kendaraan-kendaraan mereka yang selalu berseliweran (dan kadang-kadang meraung) pada saat melewati jalan. Badan-badan dengan kehadiran orang kulit putih adalah TNC, Care, STORMA, dan

Bank Pembangunan Asia melalui Central Sulawesi Integrated Conservation and Development Project (CSIACDP).

Badan-badan ini menyatakan untuk membantu kepentingan penduduk lokal, namun pernyataan ini secara luas dianggap sebagai hanya sebuah kulit luar atau suatu akal bulus.

Kedua, kesan bahwa orang barat mempengaruhi kemiskinan penduduk desa sengaja dipupuk oleh pejabat pemerintah dengan memberikan janji-janji bahwa penduduk desa akan diberikan tanah namun mereka tidak dapat melakukannya karena orang asing melarangnya.

- Kegagalan, ketidakefektifan atau salah arah dari intervensi-intervensi pembangunan oleh TNC, CARE, CSIACDP telah membantu meradikalkan penduduk yang tinggal di pinggir taman.

Penduduk desa mambantah bahwa intervensi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan membawa fasilitas baru, tetapi tidak pernah mengakui apalagi memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan lahan pertanian.

- Pada akhir tahun 1990an TNC mempunyai beberapa proyek peningkatan pendapatan di Palolo (pengumpulan kupu-kupu, produksi madu). Bagi TNC ini merupakan inisiatif skala kecil yang terutama ditujukan kepada peningkatan kepedulian orang desa terhadap konservasi dan nilai dari pada taman.

Namun penduduk desa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut menganggapnya sebagai kegiatan yang hanya membuang waktu: berlari di sekitar hutan dengan sebuah jaring kupu-kupu dan kembali dengan tangan kosong, pemeliharaan lebah dengan fasilitas yang tidak memadai dan menghadiri pelatihan dan pertemuan dengan menerima penghasilan sebagai buruh harian.

Pengalaman awal ini menciptakan suatu kesenjangan kredibilitas yang selanjutnya merusak persepsi orang desa tentang TNC. TNC hanya dianggap mengutamakan flora dan fauna, namun tidak memahami

kehidupan desa. Beberapa pemimpin di Dongi-Dongi merupakan kader-kader desa TNC, yang telah mengartikulasikan kritik terhadap kekurangan proyek-proyek TNC dan langsung mengaitkan kegagalan proyek TNC dengan keputusan mereka untuk masuk ke Dongi-Dongi.

TNC secara signifikan telah merevisi pendekatan mereka dalam beberapa tahun terakhir dan mendukung pendekatan kolaboratif yang melibatkan penduduk desa dan memperhatikan tuntutan mereka untuk memperoleh akses kepada sumber daya alam. Sayangnya, reputasi awal TNC telah melekat di hati masyarakat khususnya di Palolo.

- Pengalaman penduduk desa dengan CSIACDP telah memaksa kesan bahwa intervensi orang asing terhadap konservasi tidak dengan serius untuk pembangunan. CSIACDP dengan dana pinjaman proyek ADB senilai US\$32 juta ditujukan untuk perbaikan kesejahteraan penduduk yang tinggal di pinggir taman, sehingga aktivitas mereka di dalam taman dapat dikurangi atau digantikan.

Meskipun penelitian awal ekstensif dan kompeten yang telah mengidentifikasi masalah ketidakpilikan lahan, penolakan batas dan ketergantungan ekonomi rakyat terhadap sumberdaya taman nasional (misalnya, pemetikan kopi, pengumpulan rotan), proyek tersebut tidak didisain untuk memberikan solusi yang realistis terhadap masalah ini.

Di samping desain yang kurang memadai, proyek CSIADCP sangat lamban dalam memulai kegiatan, lamban mengambil keputusan dan menyebarkan dan tidak transparan, penciptaan siklus pengharapan dan kekecewaan. Hal tersebut sebagai akibat korupsi dan sejumlah fasilitas yang dibangun yang secara teknis mengalami kerusakan: saluran irigasi pada tempat yang salah, jalan dan jembatan dengan harga yang tinggi namun dengan kualitas yang rendah.

Ada juga intervensi ekonomi seperti pendistribusian pupuk dan benih yang tidak memberikan arti

bagi petani tanpa tanah. Program kredit yang belum terlaksana tetapi pada pengalaman sebelumnya dengan program pinjaman seperti IDT membuat orang desa sangat ragu dimana inisiatif kredit akan memberikan keuntungan material yang signifikan.

[catatan : laporan TNC menyatakan adanya pengaruh negatif dari CSIADCP dalam kaitannya antara masyarakat - taman, selama proyek meningkatkan harapan dan tidak terpenuhi akan menciptakan kesenjangan kepercayaan)

- Kegagalan proyek pembangunan juga mempengaruhi kredibilitas orang-orang desa yang bekerja sebagai fasilitator lapangan. Salah satu pemimpin Dongi-Dongi yang diminta oleh staf TNLL untuk membentuk empat belas kelompok dari empat desa di Palolo, siap untuk menerima bantuan CSIADCP.

Ini membutuhkan waktu yang banyak dan memintanya untuk membujuk rekan-rekan orang desa untuk menghadiri pertemuan, di mana mereka mengharapkan memperoleh hasil. Pada suatu kesempatan ia bertemu dengan rekan sesama orang desa membersihkan lahan di dalam taman dan membujuk mereka untuk berhenti dan menunggu bantuan dari CSIADCP. Janji bantuan tidak pernah datang.

Ia dituduh oleh anggota dari empat belas kelompok telah mencuri sumberdaya proyek, dan rumahnya diserang oleh orang-orang desa yang telah marah. Untuk menyelamatkan kredibilitasnya, ia membawa rekan-rekan sedesanya ke Dongi-Dongi, di mana kebutuhan real mereka--kebutuhan terhadap tanah--dapat terpenuhi.

- janji-janji yang salah dan kegagalan teknis dari agen-agen pemerintah telah menimbulkan pengaruh radikal yang sama. Terutama di Palolo, di mana kelangkaan lahan pertanian sangat menonjol, penduduk kembali mengulangi permintaan mereka kepada pemerintah untuk mengalokasikan lahan yang baru untuk mereka.

Masyarakat yang kehilangan lahan mereka di desa pemukiman

akibat banjir mempunyai tuntutan yang penting. Banyak dari mereka telah mendaftarkan diri untuk program transmigrasi lokal, namun program ini tidak pernah terlaksana.

Cuma beberapa keluarga pernah diajak berangkat ke lokasi transmigrasi di Lalundu, tetapi mereka kem-bali ke Palolo, karena kecewa dengan tanah yang tidak subur dan kurang tersedianya akses jalan dan ketakutan mereka terhadap kehidupan yang berkaitan dengan tingginya tingkat mortalitas.

Lebih dari satu dekade kegagalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka atas tanah, telah meninggalkan kesan bahwa mereka harus mengambil tindakan sendiri, dengan menuntut kembali tanah dari TNLL atau dari pejabat pemerintah yang mengapling tanah di desanya.

- Penduduk desa sadar bahwa mereka sering dipersalahkan sebagai penjual tanah, tetapi mereka memberikan alasan bahwa pejabat pemerintah adalah pelaku utama, karena pejabat yang mengapling dan menjual tanah dalam skala sangat besar.

Adalah pejabat pemerintah dan pejabat desa yang menjadi penghubung untuk migran Bugis dalam skala besar ke Napu dan Palolo. Jika masyarakat kecil menjual tanah, itu merupakan konsekuensi dari kemiskinan mereka (misalnya, pada saat harus membayar biaya rumah sakit).

Mereka juga menyadari bahwa praktek penjualan tanah sangat merugikan diri sendiri, dan tidak berniat melepaskan sisa tanah yang mereka masih pegang, atau yang mereka sementara menuntut dari TNLL. Mereka melihat upaya memperoleh tanah saat ini sebagai kesempatan terakhir untuk menghindari marginalisasi total.

- Penduduk desa tidak menolok kehadiran migran Bugis; mereka yakin bisa belajar dari mereka tentang produksi kakao - sepanjang mereka juga memiliki akses terhadap lahan.

Mereka tidak menolak kehadiran transmigran Jawa dan Bali di Napu, tetapi mereka menyatakan bahwa jika pemerintah dapat mencari

lahan untuk "orang lain" seharusnya bisa juga mencari lahan untuk mereka. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai "anak daerah", "anak bangsa", dan "masyarakat adat" atau masyarakat asli"-masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan wilayah ini seharusnya diberikan akses yang adil terhadap sumberdaya-sumberdayanya.

Tanpa suatu penyelesaian yang adil terhadap permasalahan tanah, prospek "konflik horizontal" di mana frustrasi dilampiaskan kepada kelompok migran sangat tinggi.

●●●

6. Rekomendasi Tindakan

- Mengakui legitimasi klaim penduduk desa di batas taman untuk akses lahan pertanian, mencari solusi negosiasi berkaitan dengan pengelolaan wilayah (sangaji 2001a, Sangaji 2001b).

Hal ini sangat penting di Dongi-Dongi di mana masih ada ancaman kekerasan, yang tidak dapat disangsikan merupakan kekerasan yang serius terhadap hak hidup mereka. Padahal keamanan dan penghidupan dijamin dalam konstitusi Indonesia dan kesepakatan hak asasi internasional.

- Penduduk di Dongi-Dongi telah berulang kali menyatakan bahwa mereka mau diatur oleh pemerintah, mereka tidak ingin menjadi pendatang di negeri sendiri dan berontak tanpa akses pendidikan, struktur pemerintahan desa dan fasilitas yang erat kaitannya dengan kehidupan "normal" desa.

Mereka juga menyatakan bahwa mereka akan tetap tinggal di Dongi-Dongi dan bukan tempat lain. Sebagaimana mereka telah menyiapkan peringatan ulang tahun kedua di Dongi-Dongi dan puluhan ribu tanaman kakao yang telah mereka tanam mulai bercabang, maka mereka akan kehilangan semuanya jika memaksa mereka pindah dan mereka akan tetap tinggal dan berjuang dan melindungi apa yang mereka telah dapatkan.

- Kaum wanita yang telah bekerja dalam beberapa dekade sebagai buruh tani berjuang untuk

menghidupi keluarga mereka dari hari ke hari dan sekarang telah merasakan buah dari kerja mereka di Dongi-Dongi.

Mereka menjual sayur-sayuran kepada pembeli yang lewat setiap hari sepanjang jalan, dan memberi makan kepada anak-anak mereka dengan jagung dan umbi-umbian yang mereka tanam sendiri. Mereka sekarang menanti panen kakao mereka yang pertama.

Pemindahan tempat pemukiman baru yang belum dikenal, direncanakan dan dibangun membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya: mereka akan dipaksa untuk memulai kembali dari nol, dan menghancurkan harapan mereka terhadap nasib anak-anaknya.

Kaum wanita secara khusus menetapkan untuk menolak segala upaya yang mencoba memindahkan mereka"biar pemerintah marah dan memukul", kata salah seorang perempuan yang berusia 60an tahun, "kami hanya cari hidup."

- Tetap penting mempertahankan konsultasi publik tentang batas-batas TNLL dan zonasinya. Dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan baru yang komprehensif dengan semua desa yang berbatasan dengan taman yang berjumlah lebih dari 60. Kesepakatan harus realistis memenuhi keinginan, tuntutan dan harapan penduduk desa dalam kaitannya dengan akses kepada kepemilikan lahan pertanian dan kemanfaatan ekonomi dari produksi kakao.

Proses pencapaian kesepakatan harus mempercepat dan menciptakan keseragaman, transparan dan komprehensif. Konsekuensi dari penundaan dan ketidak terpenuhinya kesepakatan akan selanjutnya menghilangkan kontrol terhadap TNLL, sebagaimana penduduk desa selanjutnya mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan reclaim tanah, seperti digambarkan dalam contoh di atas.

Semua bukti dari studi kami menunjukkan bahwa tindakan, kekerasan atau upaya mempertahankan suatu model taman yang melarang kegiatan budidaya atau

pemukiman akan lebih membahayakan eksistensi TNLL dan pelestariannya.

- Untuk menyelesaikan ketimpangan kepentingan agraria dan konservasi yang sangat menonjol di sekitar TNLL ada beberapa pilihan. Salah satu pilihan adalah mempertahankan batas taman yang telah ditetapkan pada tahun 1993, dengan memberikan izin penge-lolaannya kepada kelompok-kelompok yang memiliki tuntutan adat leluhur dan/ atau tuntutan keabsahan untuk tinggal sesuai dengan tuntutan unjuk rasa mereka mengenai kebutuhan lahan pertanian.

Kelihatan model tersebut untuk mencegah kemungkinan penjualan tanah kepada para migran yang memiliki modal besar, dan sangat sesuai dengan peraturan yang diciptakan oleh masyarakat sendiri pada saat melakukan pendudukan atau reklamasi terhadap tanah adat.

Dengan dukungan TNLL, niat mereka untuk menegakkan aturan dan tetap menguasai lahan dalam jangka panjang akan lebih mudah terpenuhi. Seandainya pilihan ini disetujui, lahan olahan mereka di dalam taman akan menjadi semacam budel yang tidak bisa dijual - belikan, tetapi bisa ditanami dengan tanaman nilai ekonomis asal menjaga fungsi hutan dan tidak melewati batas hutan yang telah ditetapkan oleh Balai.

Model ini juga dapat diterapkan di Dongi-Dongi, karena sangat konsisten dengan tujuan Forum dan aturan yang diformulasikan oleh Forum pada tahun 2001.

- Ada kemungkinan untuk mengakomodasi kebutuhan penggunaan lahan pertanian di dalam program zonasi TNLL. Sejauh ini, TNC telah membantu kesepakatan konservasi masyarakat (KKM) antara Balai TNLL dengan lima desa yang berbatasan dengan taman di Napu, dan telah dicapainya kesepakatan di Katu, Doda dan Toro dengan dukungan YTM.

Inisiatif ini perlu diikuti: status legal dari kesepakatan tidak jelas. Lebih serius lagi, belum diketahui kalau usulan masyarakat untuk

dikembalikan hak mengelola lahan mereka yang ada di dalam kawasan akan diterima oleh BTNLL.

Selama akses pada lahan pertanian yang merupakan isu kunci pada desa yang berbatasan dengan Taman tidak terjawab, maka suatu kesepakatan konservasi yang melarang pemanfaatan lahan pertanian tidak akan menyelesaikan permasalahan utama, dan akan menghancurkan kredibilitas konsep "collaborative management".

- Jika pemanfaatan lahan pertanian tidak dapat diterima di dalam batas taman, kemudian lahan persengketaan harus dikeluarkan dari taman nasional dengan memindahkan batas-batas dan/atau menciptakan enklaf sebagai solusi.

Untuk lahan yang dibebaskan dari kehutanan, ada dua pilihan. Pertama, tanah itu bisa diakui sebagai tanah adat di bawah petunjuk BPN untuk memecahkan konflik hak-hak komunal adat (BPN SKS/1999). Menurut aturan tersebut, tanah adat hanya dapat dimiliki secara komunal dan tidak boleh dijual belikan.

Pendekatan ini akan memberikan kesempatan kepada penduduk desa untuk menentukan praktek pengelolaan lahan mereka sendiri menurut tradisi mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian dengan kebutuhan baru.

Pilihan ini sangat cocok untuk berbagai desa yang berdekatan dengan taman nasional, tetapi kurang cocok yang heterogen atau desa di mana penduduk telah mengikuti program pemukiman dan berada jauh dari wilayah adat leluhur mereka.

Pilihan kedua, tanah yang dikeluarkan dari batas taman dapat pula ditujukan untuk dimiliki secara pribadi dengan sertifikat melalui prosedur yang telah ditentukan oleh BPN. Resiko dari pendekatan ini, kemungkinan sebagian tanah akan dijual, mengakibatkan kembali adanya penduduk tanpa tanah untuk menerobos taman, mengulangi siklus yang terjadi saat ini.

Penyerahan tanah ke migran Bugis di enklaf Lindu merupakan contoh dari proses ini.

- adanya kesadaran yang tinggi di antara penduduk yang tinggal di batas taman tentang kekeliruan menjual tanah dan pengaruh sosial dan ekonomi kepada penduduk yang tidak memiliki tanah.

Dengan pengalaman pahit demikian, ada kemungkinan penduduk desa yang tinggal di batas taman akan setuju dengan pendekatan tenurial yang memberikan mereka akses ke produk pertanian (termasuk kakao), tetapi lahan yang diolah tidak menjadi hak milik pribadi. Efektifnya, lahan pertanian akan menjadi warisan keluarga yang tetap (budel), yang dinikmati sepanjang generasi.

- Ketidakpastian yang ada sekarang pada zonasi taman dan batas-batasnya menciptakan situasi akses terbuka (open access), di mana siapa yang membuka lahan dan bagaimana cara pengolahannya, sama sekali tidak dapat dikontrol oleh siapapun.

Di Dongi-Dongi dan di tempat lain, di mana masyarakat telah masuk dan mengolah lahan secara besar-besaran, perlu proses pengorganisasian dan dukungan dari BTNLL dan LSM, untuk memastikan bahwa alokasi hak pemanfaatan lahan memenuhi kriteria tidak memiliki lahan dan/atau tuntutan adat.

Kalau tidak demikian, pasti akan mengakibatkan kesenjangan kepemilikan lahan, di mana pegawai pemerintah, pengusaha dan para spekulasi akan memonopoli sumber daya yang baru.

Risiko terutama terjadi di Dongi-Dongi, dimana ketiadaan pengakuan pemerintah dan kelemahan organisasi Forum secara de facto telah menciptakan kondisi "akses terbuka", namun juga muncul pada desa penelitian lain seperti Watumaeta dan Rahmat.

Tanpa pengakuan terhadap penduduk tanah di TNLL, masyarakat setempat sulit menjalankan aturan pengalokasian yang mereka sudah tetapkan.

- Evaluasi jangka menengah terhadap proyek CSIADCP telah diidentifikasi masalah-masalah mendasar dalam konseptualisasi, implementasi dan

managemen dari proyek dana pinjaman yang besar ini.

Evaluasi telah dilakukan secara partisipatif, namun hasilnya belum disebarluaskan. Hal ini membinggungkan penduduk desa yang tinggal di batas taman terhadap apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh proyek tersebut dan ke mana perginya dana itu.

Proyek ini dijalankan atas nama masyarakat di perbatasan taman nasional, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraannya, tetapi mereka belum diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam menentukan apakah proyek yang akan tetap dilanjutkan, dialihkan, atau dihentikan.

Seperti yang direkomendasikan dalam evaluasi tersebut, suatu audit formal mungkin diperlukan. TNC, CARE dan STORMA juga harus meningkatkan informasi dan konsultasi publik.

Dengan demikian kesalahpahaman dan keraguan tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan mereka dapat dikoreksi, dan hubungan kolaborasi dengan penduduk yang tinggal dekat batas taman dapat diciptakan. ■

Referensi

- Burkard, G. 2002a. *Natural Resource Management in Central Sulawesi: Past Experience and Future Prospects*. STORMA 8.
- Burkard, G. 2002b. *Stability or Sustainability? Dimensions of Socio-economic Security in a Rain Forest Margin*. STORMA 7.
- Li, T. 2003. *Situating Resource Struggles: Concepts for Empirical Analysis*. *Economic and Political Weekly*.
- Li, T. M. 2002. *Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi*. *Development and Change* 33:415-437.
- Sangaji, A. 2001a. *Menuju Pengelolaan TNLL Berbasis Masyarakat*. Yayasan Tanah Merdeka.
- Sangaji, A. 2001b. *Potret TNLL: Buruk Pendekatan, Rakyat Disalahkan*. Yayasan Tanah Merdeka.
- TNC. 2002. "Monitoring Sumber Daya Alam Desa Rahmat di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu," in *Building Conservation Capacity and Partnerships at Lore Lindu National Park (Final Report to NRM)*. Edited by TNC, Appendix 8. Jakarta: The Nature Conservancy.
- TNC. nd. *TNC Lesson Learned from Building Conservation Capacity and Partnership at Lore Lindu National Park*. Palu: The Nature Conservancy.
- Yayasan Kayu Riva. 2001. *Survei Demografi: Pola Perubahan Populasi dan Pengaruhnya Terhadap Manajemen Taman Nasional Lore Lindu*. Palu: The Nature Conservancy/ Balai Taman Nasional Lore Lindu.